

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



**Nama : DAVID
NIM : 222012004**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : DAVID
NIM : 222012004**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DAVID**
NIM : 222012004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini ditulis sendiri dengan sungguh- sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila terbukti di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2017
Yang Menyatakan,



David

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Peningkatan Pendapatan Kota Palembang

Nama : DAVID
NIM : 222012004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal

Pembimbing,



Nina Sabrina, SE., M.Si
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan
U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ *Kita tidak diwajibkan untuk berhasil, tetapi kita diwajibkan untuk mencoba*
- ❖ *Hasil yang kita dapat sesuai dengan seberapa besar perjuangan kita*
- ❖ *Bertambah ilmu, sebaiknya di iringi bertambah iman*
- ❖ *Biarkan takdir itu datang dengan ketentuan Allah untukmu, semoga semua itu datang seperti yang di inginkan hatimu*

Terucap syukur kepada Allah SWT.

Kupersembahkan Kepada:

❖ *Kedua Orang tua ku :*

➤ *Ayah ku (Ishak dung)*

➤ *Ibu ku (Zaurah)*

❖ *ayuk dan kakakku:*

➤ *Dina Sintia S.T*

➤ *Yyun Susanti S.Pd*

➤ *Ahmad Bagier S.E*

❖ *Sahabat-sahabatku*

❖ *Seseorang yang nanti akan menjadi pendampingku
kelak*

❖ *Pembimbing skripsi ku*

❖ *Almamatarku*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat-Nya lah, penulisan skripsi dengan judul **“pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap peningkatan pendapatan kota Palembang”** Shalawat serta salam tak terlupakan penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya benderang, kepada para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para keluargaku, saudara – saudaraku dan yang paling ku sayangi yaitu ayah dan ibuku untuk semua didikan, dorongan, semangat dan doa yang selalu diberikan serta dipanjatkan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran dan proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR. Abid Djazuli,SE.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan,SE.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi UMP.
3. Bapak Betri Sirajuddin,SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibunda Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pihak-pihak yang telah membantu dalam pengambilan data tempat penulis melakukan riset (DISPENDA KOTA PALEMBANG) yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
7. Teman-teman seperjuangku Tabrani, Ahmad Ridho, Putra Wijaya, Diego, Ejik, Ades, Deki, Aidil, Jayatri, Rini, Julio, Fahri/Kiwil, Soleh, Yoga Dan Yogi.

Semoga Allah SWT membalas budi baik seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Palembang, Maret 2017

Penulis

David

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Sebelumnya.....	10
B. Landasan Teori.....	12
1. Akuntansi sektor publik	12
2. pengertian pendapatan asli daerah	18
3. pendapatan asli daerah	22
4. Pajak daerah	23
5. Retribusi	31
6. Hasil pengelolaan kekayaan daerah	38
7. lain-lain PAD yang dipisahkan	40

BAB III. METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Operasional Variabel Penelitian	46
D. Data yang digunakan	47
E. Teknik pengumpulan data.....	47
F. Analisis data dan teknik analisis.....	48
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Hasil Penelitian.....	55
1. Gambaran umum Kota Palembang	55
2. Sejarah singkat dinas pendapatan Kota Palembang.....	55
3. Ruang lingkup kerja dinas pendapatan Kota Palembang.....	56
4. Struktur Organisasi	57
a. kedudukan, tugas pokok dan fungsi DISPENDA.....	57
b. Susunan organisasi.....	59
c. Tugas dan Fungsi	61
d. Rencana strategis Dispenda Kota Palembang	63
e. Program kerja Dispenda Kota Palembang	65
f. Visi dan Misi Dispenda kota palembang.....	68
B. Pembahasan	84
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Laporan realisasi pendapatan asli daerah 6
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya..... 11
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel..... 41
Tabel IV.1	Uji deskriptif..... 70
Tabel IV.2	Uji Multikolinearitas..... 74
Tabel IV.3	Uji Autokorelasi..... 76
Tabel IV.4	Uji Regresi Linear Berganda 78
Tabel IV.5	Koefisien Derteminasi 80
Tabel IV.6	Hasil Uji F 81
Tabel IV.7	Hasil Uji t..... 82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dispenda kota Palembang.....	69
Gambar IV.2 Uji Normalitas.....	72
Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 surat keterangan selesai penelitian dan pengambilan data
- Lampiran 2 kartu aktivitas bimbingan skripsi
- Lampiran 3 sertifikat membaca dan hapalan Al-Qur'an
- Lampiran 4 sertifikat kuliah kerja nyata (KKN)
- Lampiran 5 sertifikat toefl
- Lampiran 6 data sampel
- Lampiran 7 biodata penulis
- Lampiran 8 jadwal penelitian
- Lampiran 9 lembar persetujuan perbaikan skripsi

ABSTRAK

David /222012004/2016/ Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Peningkatan Pendapatan Kota Palembang

Rumusan masalah yang diajukan yaitu, pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap peningkatan pendapatan kota palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap peningkatan pendapatan kota palembang

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari realisasi pendapatan asli daerah pemerintahan Kota Palembang selama 10 tahun dan alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota palembang sebesar 99,2%.

Kata kunci : pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan pendapatan asli daerah.

ABSTRACT

David / 222012004/ *The Influence Of Local Tax, Local Retribution, Wealth Management Area And Other Legitimate Local Revenue To The Increased Revenue Palembang.*

the problem in this study was the influence of local tax, local retribution, wealth management area and other legitimate local revenue to the increased revenue palembang. The purpose of this study was to determine the influence of local tax, local retribution, wealth management area and other legitimate local revenue to the increased revenue palembang

this study used secondary data that was taken from taken from local revenue realization of palembang city government for 10 years from 2006-2015. Furthermore, the analysis tool used was multiple linear regression.

From the research and discussion have been conducted, it could be concluded that : local tax, local retribution, wealth management area and other legitimate local revenue gave an influence on local revenue of palembang amounted to 99,2%

Keywords : local taxes, local retribution, wealth management area, legitimate local revenue, local revenue.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya untuk meningkatkan efeksiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahanya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penepatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian pemungutan pajak dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU NO.18 Tahun1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU NO 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU NO 28 Tahun 2009.

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki wewenang yang lebih dalam besar mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut pemerintah daerah lebih bijak dalam hal pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikannya hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah untuk memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Boby rantow payu, 2014)

Agar pendanaan penyelenggaraan dapat terlaksana secara efisien penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah menjadi tanggung jawab negara dibiayai dari APBN (Mayasari, 2009:1).

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, pinjaman, daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD, yang salah satunya pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggara pemerintahan dan pembanguna daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah diharapkan nantinya dapat menjadi kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Mayasari,2009:1)

Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, dan bantuan, Pajak Pakir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet.

Selain pajak daerah, retribusi juga merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan atau Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Retribusi Pemeriksaan Pemadan Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera ulang, Retribusi Pelayanan pendidikan. Jenis Retribusi Jasa usaha terdiri atas, Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah, Retribusi Penyeberangan Di Air, Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan, Retribusi

Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Pakir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi, dan Olah Raga, Retribusi Penyeberangan Di Air, Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Peikanan.

Adapun Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah atau BUMD, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BANK SUMSEL BABEL, Perusahaan Daerah AIR TIRTA MUSI, PD. Pasar Palembang Jaya.

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah antara lain, Hasil Penjualan Aset Tetap lainnya, Jasa Giro Kas Daerah, Bunga Deposito pada BANK SUSMEL BABEL, Pendapatan dari Pengembalian PPH pasal 21, Pendapatan lain blud dan lain-lain Pendapatan PAD yang sah.

Dari keempat sumber pendapatan asli daerah tersebut perlu ditingkatkan upaya intersifikasi dan eksensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efesiensi sumber daya dan sarana yang terbatas, serta meningkatkan efektifitas pemugutan yaitu mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang kemudian potensinya memungkinkan sebagai

kontribusi yang signifikan bagi pendapatan asli kota Palembang. Kota Palembang merupakan kota yang mempunyai kultur dan nuansa perkotaan yang religius semakin banyak orang yang bermukim dan menetap maka potensi wajib pajak yang baru dapat meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya berjudul Kontribusi dan Pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Selatan oleh Toar Waraney lakoy(2016). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah untuk mencari seberapa besar kontribusi dan pengaruh dalam penelitian digunakan analisis kontribusi dan regresi sederhana. Hasilnya menunjukan kontribusi dari retribusi daerah masuk pada kriteria sedang, retribusi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Menurut A. A Bagus putu widianta(2014). Secara parsial jumlah wisata tidak berpengaruh terhadap PAD kota Denpasar, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD kota Denpasar. Menurut Bobby rantow payu (2014). Hasil analisis regresi menunjukkan dari tujuh jenis pajak daerah yang dianalisis, hanya empat jenis pajak daerah yang berkontribusi positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Gorontalo. Keempat jenis pajak tersebut adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Sementara untuk pajak restoran dan pajak galian C justru memberikan pengaruh yang negatif terhadap PAD kota Gorontalo.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Palembang dapat di lihat di tabel berikut:

Tabel I. 1
Rekapitulasi target dan realisasi pendapatan asli daerah kota Palembang dari tahun 2006 s/d 2015 perbulan dalam milyaran rupiah

Tahun	Pajak daerah		Retribusi daerah		pengelolaan kekayaan daerah		Lain-lain pendapatan daerah		Jumlah PAD	
	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
2006	43.225	45.057	61.041	40.375	1.000	821	7.680	10.948	112.947	97.202
2007	51.475	51.486	55.999	48.572	2.750	2.366	21.325	39.702	131.549	142.128
2008	69.350	69.367	65.332	59.005	8.000	1.951	29.632	41.009	172.315	171.383
2009	87.485	84.696	64.629	51.274	10.000	8.402	56.477	26.167	218.592	170.540
2010	93.420	104.047	74.393	65.175	20.000	23.533	22.235	62.437	210.049	256.193
2011	172.117	207.746	90.795	81.710	25.570	35.184	69.522	48.336	358.005	372.978
2012	287.152	333.104	92.533	106.509	25.435	27.403	50.816	54.859	455.936	512.877
2013	322.113	357.230	125.479	118.616	25.768	24.824	81.536	188.432	554.925	689103
2014	395.888	463.574	153.590	85.154	56.000	28.021	148.371	151.375	753.849	728.123
2015	478.025	479.112	86.108	75.664	36.279	34.503	138.432	145.540	738.845	734.820

Sumber: dispenda kota Palembang

Berdasarkan data diatas bahwa di dalam laporan target dan realisasi tahun 2006 s/d 2015 dari empat unsur utama penerimaan PAD hanya pada tahun 2012 semua target terealisasi sedangkan pada tahun 2006 s/d 2008 tidak terealisasi pada retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah, pada tahun 2009 tidak teralisasi pada pajak daerah retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah, pada tahun 2010 tidak terealisasi pada retribusi, pada tahun 2011 tidak terealisasi pada retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang

sah, sedangkan pada tahun 2013 s/d 2015 tidak terealisasi pada retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD. Oleh sebab itu peneliti mencoba meneliti hal tersebut, dengan judul **“pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap peningkatan pendapatan kota Palembang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan terhadap peningkatan pendapatan kota Palembang
- b. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara parsial terhadap peningkatan pendapatan kota Palembang

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan yang sebelumnya maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan terhadap peningkatan pendapatan kota Palembang
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara parsial terhadap peningkatan pendapatan kota Palembang

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian dapat diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan wawasan bagi penulis maupun yang pembaca hasil penelitian ini.

2. Bagi dispenda kota Palembang

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan dan lain-lain pendapatan yang sah secara tidak langsung akan menambah penerimaan PAD. Sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi almamater

Sebagai referensi dan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa sabagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mayang, dian, 2009 **kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah** (analisis terhadap kabupaten dan kota di jawa timur) skripsi pada FE UMM.
- Mardiasmo,2011. **Perpajakan**. Edisi Revisi. Penerbit Andi jogjakarta.
- Siahaan, mariohot p.2013 **pajak daerah dan retribusi daerah**. Penerbit. PT. Raja Grafindo persada jakarta.
- Siti Resmi, 2009. **Perpajakan: Tiori Dan Kasus**, Salemba Empat Jakarta
- Siahaan, mariohot p. 2016 **pajak daerah**. Penerbit. PT. Raja Grafindo persada jakarta.
- Siahaan, mariohot p. 2016 **retribusi** . Penertbit. PT. Raja Grafindo persada jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 34 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keunagan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
- Lakoy,toar waraney 2016. **Kontribusi dan pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten minahasa selatan**. Jurnal ilmiah vol.16.No.01 tahun 2016
- Payu, boby rantow, 2014. **Analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota gorontalo**. Jurnal akuntansi/volume XVII, No.01 Januari 2014.
- Sugiyono,2009. **Metodelogi penelitian**